

**PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI-PROVINSI
DI PULAU JAWA
SKRIPSI**



Oleh :

Nama : Yunita Aida Ismaya Sari
Nomor Mahasiswa : 18313222
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2022

Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Upah
Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi
Di Pulau Jawa

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Yunita Aida Ismaya Sari

Nomor Mahasiswa : 18313222

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2022

**PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI-PROVINSI**

DI PULAU JAWA

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Yunita Aida Ismaya Sari

Nomor Mahasiswa : 18313222

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Siap diujikan 15/5/2022

|

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2022



Yunita Aida Isnaya Sari

PENGESAHAN

Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Upah
Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi Di

Pulau Jawa

Nama : Yunita Aida Ismaya Sari

Nomor Mahasiswa : 18313222

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 15 Mei 2022

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Nur Feriyanto, Prof. Dr. Drs., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI,
DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
PROVINSI-PROVINSI DI PULAU JAWA**

Disusun Oleh : **YUNITA AIDA ISMAYA SARI**
Nomor Mahasiswa : **18313222**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Selasa, 14 Juni 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Nur Feriyanto, Prof. Dr. Drs., M.Si



Penguji : Diana Wijayanti, S.E., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia




Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN MOTTO

“ Sesungguhnya Sesudah Kesulitan itu Ada Kemudahan ”

(Q.S Al-Insyirah : 6)

“ Sukses bukan milik orang yang punya IPK tinggi saja “

(BJ Habibie)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Terima kasih kepada Allah SWT
2. Terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW
3. Kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan dukungan, nasihat dan doa yang tidak pernah putus, sehingga saya bisa menyelesaikan kewajiban saya menuntut ilmu di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Nur Feriyanto Prof. Dr. Drs.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Kakak tercinta saya
6. Teman-teman terbaik saya Puput, Fila, Via, Shafa, Annis, Jay, terimakasih selalu ada dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb,

Alhamdulillahirabbil'Alamin puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi. Adapun skripsi ini berjudul **“Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tidak lepas dari dukungan dari semua pihak. Oleh sebab itu dengan selesainya penyusunan skripsi perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang terlibat untuk membantu menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya, Bapak Eko Wiharyanto dan Ibu Frida Yuningsih yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan doa tiada henti sehingga saya dapat berada di titik ini dan menjadi kebanggaan keluarga.
3. Kakak saya Fitria Ayu Wijayanti yang telah telah memberikan dukungan dan doa.
4. Bapak Nur Feriyanto, Prof. Dr. Drs., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, motivasi, waktu, kesabaran dan dukungan serta saran yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Fathul Wahid. S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Jaka Sriyana SE., MSi., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, MA selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

8. Seluruh dosen Ilmu Ekonomi dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
9. Teman-teman seperjuangan Putri Nurmala, Dahlia Masfila, Shafa Tanisya, Annis Fadhilah, Dwi Olivia, Inggrid Wilskiana dan Tim kontrakan yang selalu memberikan dukungan dan yang telah membantu kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih untuk kalian yang telah memberikan kenangan indah di masa kuliah ini selama 3,5 tahun. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai, Amiin.
10. Teman saya dari kecil hingga saat ini dan seterusnya Eka Aprilia Nasution yang selalu menghiburku ketika saya mengalami kesulitan, serta memberi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman saya dari SMA hingga Kuliah Ica Hannuun yang selalu memberi dukungan dan memberikan semangat.
12. Seluruh teman dan keluarga besar Ilmu Ekonomi 2018.
13. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebuah kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadikan penulis yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2022



Yunita Aida Ismaya Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN UJIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	12
2.1 Kajian Pustaka.....	12
2.2 Landasan Teori	20
2.2.1 Tenaga Kerja.....	20

2.2.2	Penyerapan Tenaga Kerja	21
2.2.3	Permintaan Tenaga Kerja	23
2.2.4	Penawaran Tenaga Kerja	24
2.2.5	Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.....	25
2.2.5.1	Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal	26
2.2.5.2	Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal	26
2.2.5.3	Hubungan PMA, PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja.....	27
2.2.6	Teori Upah.....	27
2.2.6.1	Teori Adam Smith	28
2.2.6.2	Teori David Ricardo.....	28
2.2.7	Upah Minimum.....	29
2.2.7.1	Upah Minimum Provinsi (UMP).....	30
2.2.7.2	Hubungan Upah Minimum dan Penyerapan Tenaga Kerja	31
2.3	Kerangka Pemikiran.....	31
2.4	Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN.....		33
3.1	Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	33
3.1.1	Jenis dan Sumber Data	33
3.1.2	Metode Pengumpulan Data	33
3.2	Definisi Variabel Operasional.....	34
3.2.1	Variabel Terikat (Dependen Variabel).....	34
3.2.2	Variabel Bebas (Independen Variabel).....	34
3.3	Metode Analisis Data.....	35
3.3.1	Pemilihan Model Estimasi.....	37
3.3.2	Koefisien Determinasi (R^2).....	39
3.3.3	Uji F Statistik (Pengujian variabel secara menyeluruh)	39
3.3.4	Uji t Statistik (Pengujian variabel secara individu)	40
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Deskriptif Data	42
4.2	Hasil dan Analisis dan pembahasan.....	43

4.2.1 Hasil Uji Chow.....	44
4.2.2 Hasil Uji Hausman	44
4.2.3 Hasil Estimasi Model Fixed Effect	45
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis.....	46
4.3.1 Koefisien Determinasi R^2	46
4.3.2 Hasil Uji F Statistik.....	46
4.3.3 Hasil Uji t Statistik	47
4.4 Interpretasi Hasil Regresi	49
4.5 Analisis antar Provinsi di Pulau Jawa	49
4.6 Pembahasan	49
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Implikasi	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (jiwa) Provinsi di Pulau Jawa tahun 2005-2020	4
Tabel 1.2 Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing Provinsi di Pulau Jawa tahun 2005-2020	6
Tabel 1.3 Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi di Pulau Jawa tahun 2005-2020	6
Tabel 1.4 Upah Minimum Provinsi (rupiah) Provinsi di Pulau Jawa tahun 2005-2020..8	
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	41
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow	44
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman.....	44
Tabel 4.4 Model <i>Fixed effect</i>	45
Tabel 4.5 Estimasi Pengujian Hipotesis.....	47
Tabel 4.6 Nilai Intersep	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pulau di Indonesia tahun 2016-2020.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 3.1 Pengujian Pemilihan Model.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	59
Lampiran 2 : Hasil Uji Model Common Effect	59
Lampiran 3 : Hasil Uji Model Fixed Effect	60
Lampiran 4 : Hasil Uji Model Random Effect	60
Lampiran 5 : Hasil Uji Chow.....	61
Lampiran 6 : Hasil Uji Hausman.....	62
Lampiran 7 : Hasil Uji Regresi Berganda Pada Model Fixed Effect.....	63
Lampiran 8 : Data PTK, PMA, dan PMDN tahun 2005 & 2020	64
Lampiran 9 : Rata-rata Pekerja Informal	64
Lampiran 10 : Data Penelitian.....	64

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-Provinsi yang berada di Pulau Jawa tahun 2005-2020. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan adalah data panel yang terdiri dari enam Provinsi di Pulau Jawa selama 16 tahun yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2020. Adapun model terbaik yang digunakan dalam data panel adalah model *fixed effect*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan diolah menggunakan aplikasi *software* E-views 9. Diperoleh hasil dari penelitian ini bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2005-2020, sedangkan variabel Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2005-2020.

Kata kunci : *Penyerapan Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Upah Minimum Provinsi (UMP).*

BAB I

PENDAHULUAN

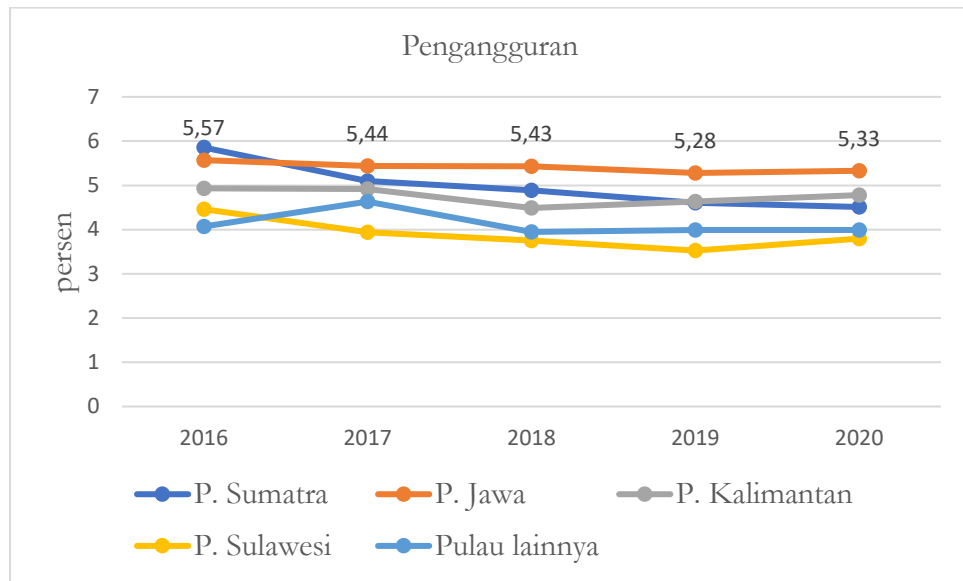
1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah dan juga masyarakat yang bertindak sebagai pemeran dalam suatu negara bertujuan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010). Dalam pembangunan ekonomi menciptakan kesempatan kerja sebanyak –banyaknya agar angkatan kerja yang ada dapat terserap dalam kegiatan ekonomi menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai karena penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan ekonomi (Rimbawan, 2012). Faktor-faktor dalam perekonomian seperti penanaman modal, sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi akan berpengaruh terhadap tercapainya pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara. Pembangunan ekonomi dalam prosesnya baik pemerintah maupun masyarakat memiliki peran yang penting dalam mengelola sumber daya yang ada, serta pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan sektor swasta guna menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi.

Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki permasalahan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan yaitu mengenai ketenagakerjaan. Hal tersebut terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan angkatan kerja. Kesempatan kerja yang terbatas akan menyebabkan timbulnya pengangguran. Terbatasnya kesempatan kerja akan membawa dampak secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan masalah-masalah lainnya yang dapat mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi (Pangastuti, 2015). Pemerintah perlu mempersiapkan sumber daya manusia agar memiliki keterampilan. Keterampilan ini dapat diberikan melalui pelatihan dan

pendidikan. Dengan adanya bekal keterampilan ini menjadi modal utama bagi angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Meningkatnya keterampilan dan kreatifitas yang dimiliki tenaga kerja tentu akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas kerja.

Jumlah penduduk yang besar pada umumnya berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita suatu negara, yang secara garis besar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Diketahui bahwa jumlah penduduk di Pulau Jawa pada tahun 2020 sebesar 151.591.262 jiwa atau setara dengan 56,10 % dari total jumlah penduduk di Indonesia. Ini berarti hampir setengah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Ada pendapat yang menyatakan bahwa jumlah penduduk yang tinggi memiliki potensi tenaga kerja yang besar bagi pembangunan (Wihastuti & Rahmatullah, 2018). Namun disisi lain pertumbuhan penduduk yang tinggi justru akan menimbulkan permasalahan bagi pembangunan ekonomi. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 5,5%. Diketahui bahwa tingkat pengangguran di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding dengan pulau-pulau lain yang berada di Indonesia. Pada tahun yang sama tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa sebesar 5,57% dengan angka tertingginya berada di Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini terjadi karena Pulau Jawa menjadi pusat pembangunan nasional dan menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sehingga banyak kegiatan urbanisasi dimana orang berbondong-bondong datang ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan. Masyarakat yang datang ke Pulau Jawa berpikir bahwa di Pulau Jawa banyak tersedia lapangan pekerjaan.



**Gambar 1.1 Perbandingan tingkat Pengangguran
Berdasarkan Pulau di Indonesia tahun 2016-2020**

Sumber : BPS, diolah

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa masih cenderung tinggi yaitu sebesar 5,57 persen pada tahun 2016. Kecenderungan tingginya tingkat pengangguran tersebut membuktikan bahwa terjadi masalah perekonomian di Pulau Jawa pada faktor ketenagakerjaan. Sehingga penambahan lapangan pekerjaan khususnya di Pulau Jawa sangat diperlukan agar tingkat pengangguran tidak semakin tinggi, hal ini karena di Pulau Jawa jumlah penduduk terus meningkat. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain investasi dan upah tenaga kerja. Apabila faktor-faktor tersebut mengalami perubahan hal ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Suatu perekonomian dikatakan baik tidak hanya dapat berkembang dengan pesat tetapi juga harus diikuti dengan perluasan kesempatan kerja agar angkatan kerja yang ada dapat diserap.

Tabel 1.1
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)
Provinsi di Pulau Jawa tahun 2005-2020

Tahun/ Provinsi	Penyerapan Tenaga Kerja						Perkembangan (%)
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI.Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	
2005	3.525.575	14.637.107	15.558.350	1.734.047	17.679.076	3.286.227	-
2006	3.672.195	14.986.799	15.747.596	1.752.763	17.815.142	3.248.414	1,42
2007	3.062.656	11.486.796	11.244.988	1.280.898	12.799.689	2.542.866	-25,9
2008	4.123.471	16.322.615	15.784.843	1.877.976	18.871.819	3.660.628	43
2009	4.152.673	16.844.447	15.618.439	1.910.639	19.214.138,5	3.748.802	1,4
2010	4.449.333	17.062.626	15.882.741	1.858.956	19.154.824	4.198.900	1,82
2011	4.527.771	17.813.912	16.029.286	1.824.010	19.173.183	4.498.629	2,01
2012	4.765.343	18.464.506	16.323.402	1.880.006	19.206.794	4.763.137	2,41
2013	4.671.634	18.707.216	16.234.274	1.866.055	19.460.153	4.824.430	0,55
2014	4.656.604	19.337.363	16.650.829	1.972.478	19.595.949	4.896.043	2,05
2015	4.904.279	19.624.186	16.878.584	1.951.922	19.584.086	5.016.792	1,27
2016	4.933.190	19.739.575	16.836.595	2.040.132	19.381.614	5.161.386	0,2
2017	4.839.168	20.636.957	17.315.123	2.054.530	20.066.760	5.291.850	3,1
2018	4.932.932	20.848.173	17.354.343	2.097.417	20.322.598	5.473.929	1,18
2019	5.002.450	21.948.486	17.623.207	2.136.382	20.709.093	5.619.535	2,83
2020	4.914.961	22.068.407	17.760.959	2.107.044	21.140.589	5.586.895	0,74

Sumber : BPS

Perkembangan jumlah penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2005 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif, hal ini wajar dikarenakan imbas dari adanya siklus ekonomi yang tidak stabil. Penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan yang signifikan yaitu pada tahun 2007 sebesar 25,9 persen. Jumlah tenaga kerja di Pulau Jawa selama periode 2005-2020 paling tinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 73.578.854 jiwa. Berdasarkan data pada Tabel 1.1 bahwa penyerapan tenaga kerja Provinsi di Pulau Jawa pada periode 2005-2020 perlu ditingkatkan karena masih belum maksimal dimana masih terjadi kenaikan dan penurunan. Sehingga pemerintah harus memperhatikan dan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Masalah ketenagakerjaan masih menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan, disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan

ketersediaan lapangan kerja hal ini akan berdampak terhadap kenaikan tingkat pengangguran.

Tingginya penanaman modal yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik. Kondisi ini akan menarik para investor untuk menanamkan modal mereka di negara tersebut. Hal ini tentunya berdampak baik tidak hanya bagi negara tetapi juga untuk setiap daerah.

Dalam tercapainya pembangunan ekonomi pemerintah memerlukan modal yang sangat besar. Dalam mencapai pembangunan ekonomi pemerintah melakukan beberapa cara salah satunya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan investasi. Investasi dibedakan menjadi dua yaitu, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua jenis investasi tersebut baik PMA dan PMDN dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi, selanjutnya akan berdampak pada penawaran tenaga kerja guna menunjang kegiatan produksi perusahaan. Kegiatan investasi akan mendorong masyarakat untuk terus produktif dalam menghasilkan barang dan jasa sehingga pendapatan dan taraf hidup masyarakat akan meningkat (Sandika, dkk, 2014). Investasi memiliki peran yang penting dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja dan adanya kegiatan investasi diharapkan dapat meningkatkan produksi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Keynes, menyatakan bahwa investasi memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Keberadaan investasi akan menambah permodalan yang akan mendorong terciptanya perluasan dalam barang modal sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru dan akan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009). Menurut teori Todaro (2006), investasi merupakan bagian penting yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi akan meningkatkan permodalan sehingga output meningkat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2005-2020 terlihat selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dapat dilihat dari nilai realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang terdapat pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.

Tabel 1.2
Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing
Provinsi di Pulau Jawa tahun 2005-2020

Tahun/ Provinsi	Penanaman Modal Asing (Juta USD)						Jumlah
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI.Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	
2005	3.266,8	2.561,4	23,9	17,3	702,2	668,2	7.239,8
2006	1.468,4	1.619,3	380,1	48,8	384,3	511,9	4.412,8
2007	4.676,9	1.326,9	100,7	0,8	1.689,6	708,6	8.503,5
2008	9.927,6	2.552,2	135,6	16,7	457,1	477,7	13.566,9
2009	5.510,8	1.934,4	83,1	8,1	422,1	1.412	9.370,5
2010	6.429,3	1.692	59,1	4,9	1.769,2	1.544,2	11.498,7
2011	4.824,1	3.839,4	175	2,4	1.312	2.171,7	12.324,6
2012	4.107,7	4.210,7	241,5	84,9	2.298,8	2.716,3	13.659,9
2013	2.591,1	7.124,9	464,3	29,6	3.396,3	3.720,2	17.326,4
2014	4.509,4	6.562	463,4	64,9	1.802,5	2.034,6	15.436,8
2015	3.619,4	5.738,7	850,4	89,1	2.593,4	2.542	15.433
2016	3.398,2	5.470,9	1.030,8	19,6	1.941	2.912,1	14.772,6
2017	4.595	5.142,9	2.372,5	36,5	1.566,7	3.047,5	16.761,1
2018	4.857,7	5.573,5	2.372,7	81,3	1.333,4	2.827,3	17.045,9
2019	4.123	5.881	2.723,2	14,6	866,3	1.868,2	15.476,3
2020	3.613,3	4.793,7	1.363,6	9,7	1.575,5	2.143,6	13.499,4

Sumber : BPS

Tabel 1.3

**Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri
Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2005-2020**

Tahun/ Provinsi	Penanaman Modal Dalam Negeri (Milyar Rupiah)						Jumlah
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI.Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	
2005	2.546	3.405,3	986,4	2.251	4.056,9	3.833,2	17.078,8
2006	3.088	5.314,4	275,8	2.144,9	517,4	3.815,2	15.155,7
2007	4.218	11.347,9	276,5	1.801,5	1.724,7	1.068,7	20.437,3
2008	1.837,3	4.289,5	1.336,3	1.806,4	2.778,3	1.989,1	14.036,9
2009	9.693,8	4.724,9	2.642,6	1.825,2	4.290,7	4.381,7	27.558,9
2010	4.598,5	15.799,8	795,4	1.884,9	8.084,1	5.852,5	37.015,2
2011	9.256,4	11.194,3	2.737,8	2.313	9.687,5	4.298,6	39.487,6
2012	8.540,1	11.384	14.393,2	2.805,9	21.520,3	5.117,5	63.761
2013	5.754,5	9.006,1	12.593,6	2.864,6	34.848,9	4.008,7	69.076,4
2014	17.811,5	18.726,9	13.601,6	3.568,5	38.132	8.081,3	99.921,8
2015	15.512,7	26.272,9	15.410,7	3.951,6	35.489,8	10.709,9	107.347,6
2016	12.216,9	30.360,2	24.070,4	4.522,8	46.331,6	12.426,3	129.928,2
2017	47.262,3	38.390,6	19.866	4.817,4	45.044,5	15.141,9	170.522,7
2018	49.097,4	42.278,2	27.474,9	10.949,1	33.333,1	18.637,6	181.770,3
2019	62.094,8	49.284,2	18.654,7	9.667,8	45.452,7	20.708,4	205.862,6
2020	42.954,7	51.400,5	30.606,1	9.485,9	55.660,6	31.145,7	221.253,5

Sumber: BPS

Perkembangan nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Pulau Jawa yang terdiri dari enam Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Banten mengalami fluktuatif dari tahun 2005 sampai tahun 2020. Perkembangan Investasi di Pulau Jawa tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 17.326,4 juta USD. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 sampai tahun 2016 investasi PMA mengalami penurunan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2018 PMA mengalami kenaikan sebesar 1.988,5 juta USD dan pada tahun 2018 nilai PMA mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya menjadi 17.045,9 juta USD. Penanaman Modal Asing tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata sebesar 4.469,9 juta

USD, dan Penanaman Modal Asing terendah berada di Provinsi DI Yogyakarta dengan rata-rata sebesar 33,1 juta USD.

Perkembangan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2005-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2005 ke 2006 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami penurunan dengan nilai sebesar 1.923,1 milyar rupiah. Pada tahun 2007 ke 2008 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami penurunan sebesar 6.400,4 milyar rupiah. Pada tahun berikutnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020. Penanaman Modal Dalam Negeri Tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata sebesar 24.184,6 Milyar rupiah, dan Penanaman Modal Dalam Negeri berada di Provinsi DI Yogyakarta dengan rata-rata 4.166,3 Milyar rupiah.

Di antara pulau – pulau yang berada di wilayah Indonesia, Pulau Jawa memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena Pulau Jawa dikenal sebagai pusat perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di setiap pulau berbeda hal ini disebabkan oleh tingginya arus perdagangan barang dan jasa yang dimana hal ini memiliki peran penting. Tingginya arus perdagangan dikarenakan para investor yang menanamkan modalnya kebanyakan berada di Pulau Jawa.

Tabel 1.4

Upah Minimum Provinsi (Rupiah)

Provinsi di Pulau Jawa tahun 2005-2020

Tahun/ Provinsi	DKI Jakarta	Upah Minimum Provinsi			Jawa Timur	Banten
		Jawa Barat	Jawa Tengah	DI.Yogyakarta		
2005	711.843	408.260	390.000	400.000	340.000	585.000
2006	819.100	447.654	450.000	460.000	390.000	661.613
2007	900.560	516.840	500.000	500.000	448.500	746.500
2008	972.604	568.193	547.000	586.000	500.000	837.000

2009	1.069.865	628.191	575.000	700.000	570.000	917.500
2010	1.118.009	671.500	660.000	745.694	630.000	955.300
2011	1.290.000	732.000	675.000	808.000	705.000	705.000
2012	1.529.150	780.000	765.000	892.660	745.000	745.000
2013	2.200.000	850.000	830.000	947.114	866.250	866.250
2014	2.441.000	1.000.000	910.000	988.500	1.000.000	1.325.000
2015	2.700.000	1.000.000	910.000	988.500	1.000.000	1.600.000
2016	3.100.000	1.312.355	1.265.000	1.237.700	1.273.490	1.784.000
2017	3.355.750	1.420.624	1.367.000	1.337.645	1.388.000	1.931.180
2018	3.648.035	1.544.360	1.486.065	1.454.154	1.508.894	2.099.385
2019	3.940.973	1.668.372	1.605.396	1.570.923	1.630.059	2.267.990
2020	4.276.349	1.810.350	1.742.015	1.704.608	1.768.777	2.460.996

Sumber : BPS

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja selain Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah tingkat upah. Upah diartikan sebagai harga atau balas jasa dari tenaga yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Semakin tinggi upah yang dibayarkan perusahaan kepada pegawai maka keuntungan yang diperoleh perusahaan juga akan berkurang. Sebaliknya jika upah minimum rendah akan menguntungkan pelaku usaha.

Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) terjadi di Indonesia pada setiap tahunnya. Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan oleh pemerintah pusat dan digunakan sebagai standar pengupahan bagi pemerintah daerah. Kebijakan upah minimum berhubungan erat dengan permasalahan penyerapan tenaga kerja. Selain investasi, upah menjadi faktor yang penting dalam penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Tabel 1.4 Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2005 sampai 2020 terus mengalami kenaikan. Peningkatan upah minimum tidak selalu dibarengi dengan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja (Febrianty & Juliannisa, 2021). Hal ini terbukti pada Tabel 1.4 bahwa di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten UMP setiap tahunnya

mengalami peningkatan sedangkan jumlah tenaga kerja pada tahun 2005 sampai 2020 mengalami peningkatan dan penurunan. DKI Jakarta memiliki tingkat upah minimum yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya, sementara itu Provinsi DI Yogyakarta memiliki upah minimum terendah.

Berdasarkan teori klasik, upah memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini terjadi karena jika suatu perusahaan menaikkan upah akan berdampak terhadap biaya produksi barang dan jasa juga naik. Sehingga perusahaan menaikkan harga barang dan jasa tersebut tetapi hal ini justru menurunkan permintaan barang sehingga mengharuskan perusahaan mengurangi produksi mereka.

Data menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2016-2020 masih relatif tinggi sebesar 5,41 persen. Relatif tingginya tingkat pengangguran tersebut berarti membuktikan bahwa terjadi masalah Perekonomian di Pulau Jawa pada faktor ketenagakerjaan. Melihat kondisi ini menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan studi mengenai **“Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Periode 2005-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa?
4. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.
2. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.
3. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.
4. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menjadi masukan atau input sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk instansi-instansi terkait dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan perluasan penyerapan tenaga kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.
2. Memberi referensi yang dapat digunakan bagi kalangan akademis fakultas ekonomi dalam melanjutkan penelitian yang sama dengan penelitian ini.
3. Sebagai bahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis.

1.4 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan dan Implikasi

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Manfaat serta Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Berisikan tentang kajian Pustaka dan landasan teori. Hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Landasan teori merupakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian terdahulu, pada bagian ini menguraikan terkait hasil kajian dari penelitian terdahulu. Kerangka Pemikiran, dan mencoba menarik suatu Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai Analisis Deskriptif dan Objek Penelitian, serta berisikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari data yang telah diolah, dan Pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Menjelaskan mengenai Kesimpulan dan Implikasi dari bagian pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta memberi saran terhadap hasil penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Feriyanto,N & Sriyana,J (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “*Labor Absorption Under Minimum Wage Policy in Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan data *panel* pada tahun 2006 hingga 2013 dari 33 Provinsi di Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi di Indonesia, Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sementara itu variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Budiriansyah, L., Tarmizi, N., & Soebyakto, B. B (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analysis of Labor Absorption Province of South Sumatera*”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel independennya yaitu pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, upah minimum provinsi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi multiple linier. Hasil regresi dari penelitian menunjukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan, variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan.

Wihastuti & Rahmatullah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Upah Minimum Provinsi dan Tenaga Kerja di Pulau Jawa” tahun 2011-2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penyerapan tenaga kerja

dan variabel independennya yaitu upah minimum dan PDRB. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan regresi data panel dari 6 Provinsi di Pulau Jawa dengan periode tahun 2011 sampai 2016. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Jaya, J.T., & Kholilah (2020) dalam penelitian yang berjudul “*Effect of Gross Domestic Regional Bruto, Provincial Minimum Wage, and investment on Labor Absorption*”. Variabel dependennya adalah penyerapan tenaga kerja, variabel independennya adalah PDRB, dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari enam Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2013 sampai 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tenaga kerja di enam provinsi di Pulau Jawa.

Pratama, R.P., Muhammad, S., & Silvia, V (2020) dalam penelitian yang berjudul “*Do Minimum Wage and Economic Growth Matter Absorption in Sumatera Island, Indonesia*”. Variabel dependennya adalah penyerapan tenaga kerja, variabel independennya adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan analisis data panel dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera pada periode 2008-2017 dengan metode ARDL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera.

Table 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil dan Analisis Penelitian
1	Feriyanto,N & Sriyana,J (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “ <i>Labor Absorption Under Minimum Wage Policy in Indonesia</i> ” Tahun 2006-2013	Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing , Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja	Metode analisis regresi data panel dan model terbaik <i>fixed effect</i>	variabel upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi di Indonesia, Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sementara itu variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2	Budiriansyah, L., Tarmizi, N., & Soebyakto, B. B (2018) dalam	Pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam	Metode analisis multiple linear regresi	pertumbuhan ekonomi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal

	penelitiannya yang berjudul “ <i>Analysis of Labor Absorption Province of South Sumatera</i> ”. Tahun 2006-2015	negeri, penanaman modal asing, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan penyerapan tenaga kerja		Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan
3	Wihastuti dan Rahmatullah (2018) Upah Minimum Provinsi dan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2011-2016	Upah Minimum Provinsi (UMP), PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja	Metode analisis regresi data panel dan model terbaik <i>fixed effect</i>	Secara simultan variabel Upah minimum dan PDRB di Pulau Jawa terbukti mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan pertumbuhan

				ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
4	Jaya, J.T., & Kholilah (2020) dalam penelitian yang berjudul “ <i>Effect of Gross Domestic Bruto, Provincial Minimum Wage, and investment on Labor Absorption</i> ”. Tahun 2013-2019	PDRB, Investasi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan penyerapan tenaga kerja	Metode analisis regresi data panel dan model terbaik <i>fixed effect</i>	Variabel PDRB dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di enam Provinsi di Pulau Jawa, sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di enam Provinsi di Pulau Jawa.
5	Pratama, R.P., Muhammad, S., & Silvia, V (2020) dalam penelitian yang berjudul “ <i>Do Minimum Wage and Economic Growth Matter Absorption in</i>	Upah Minimum Provinsi (UMP), Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	Metode analisis regresi data panel dengan metode ARDL	variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera, sedangkan variabel

	<i>Sumatera Island, Indonesia</i> ". tahun 2008-2017			pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera.
--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel 2.1 kajian penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini penulis mengacu kepada penelitian Feriyanto,N & Sriyana, J (2016) yang menganalisis pengaruh Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing , Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 33 Provinsi di Indonesia pada tahun 2006-2013. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di enam Provinsi di Pulau Jawa. Periode penelitian yaitu pada tahun 2005-2020. Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Data Panel.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang termasuk pada usia kerja yang dimaksud dengan usia kerja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih, yang sedang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan (Romdhoni, 2017). Tenaga kerja juga diartikan sebagai tenaga kerja yang bekerja minimal 36 jam selama seminggu, suatu bangsa dikatakan semakin sejahtera dapat dilihat dari semakin pendeknya jam kerja.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk masyarakat.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) tenaga kerja dibagi menjadi 2 kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan Kerja merupakan penduduk yang termasuk dalam usia kerja yang bekerja yang sedang mencari pekerjaan dan yang sedang tidak bekerja karena ada suatu alasan tertentu. Bukan Angkatan Kerja ialah penduduk yang termasuk usia kerja tetapi tidak melakukan suatu kegiatan

Tenaga kerja menjadi hal yang penting dalam faktor produksi selain *capital* atau modal dan teknologi. Hal ini karena manusia merupakan penggerak bagi faktor-faktor produksi. Tenaga kerja secara umum diartikan sebagai manusia yang mampu menghasilkan barang atau jasa yang mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

2.2.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Kuncoro (2002) penyerapan tenaga kerja mencerminkan banyaknya lapangan pekerjaan yang telah terisi yang berasal dari jumlah penduduk yang bekerja. Terserapnya penduduk yang bekerja dipengaruhi oleh permintaan akan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja dalam sektor ekonomi akan mempengaruhi seberapa besar produktivitas yang dihasilkan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Disisi lain pengusaha mempekerjakan seseorang karena membantu dalam produksi barang yang kemudian dijual kepada konsumen. Sehingga permintaan masyarakat akan barang yang diproduksi akan mempengaruhi permintaan pengusaha terhadap penyerapan tenaga kerja, jika terjadi kenaikan permintaan masyarakat akan barang maka permintaan tenaga kerja juga akan naik.

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai banyaknya orang yang dapat terserap oleh lapangan pekerjaan dengan kata lain keseimbangan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan banyaknya tenaga kerja yang ada sehingga tidak akan terjadi pengangguran. Sebaliknya jika jumlah angkatan kerja lebih besar daripada jumlah kesempatan kerja maka akan terjadi pengangguran (Feriyanto, 2014)

Di Indonesia status penduduk yang bekerja dibedakan menjadi dua, yaitu: pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan yang termasuk ke dalam pekerja informal mencakup pekerja yang berstatus pekerja yang berusaha sendiri pada perusahaan miliknya, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga/tidak dibayar/ pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja bebas di pertanian.

Sektor formal merupakan bagian dari struktur pekerjaan yang terorganisir, pekerjaan yang terdaftar dalam perekonomian dan dilindungi aturan hukum. Sedangkan sektor informal merupakan kegiatan wirausaha yang tidak terlindungi oleh aturan hukum sehingga pada sektor informal tidak ada hambatan masuk (*free entry*). Pada sektor informal ini dapat menciptakan kesempatan kerja yang banyak.

2.2.3 Permintaan Tenaga Kerja

Teori permintaan menurut Simanjuntak (1985) merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Sedangkan dalam teori permintaan tenaga kerja harga yang dimaksud disini adalah tingkat upah. Permintaan tenaga kerja merupakan hubungan antar tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan untuk dipekerjakan (Sholeh, 2007). Permintaan tenaga kerja berbeda dengan permintaan agregat, permintaan agregat terjadi ketika masyarakat membeli barang atau jasa untuk memenuhi kepuasan mereka, berbeda halnya dengan permintaan tenaga kerja, dimana perusahaan mempekerjakan tenaga kerja untuk membantu memproduksi barang atau jasa. Permintaan tenaga kerja tergantung dengan permintaan masyarakat akan barang dan jasa, jika permintaan agregat bertambah maka perusahaan membutuhkan tambahan pekerjaan sehingga permintaan tenaga kerja juga akan naik. Untuk mengetahui tentang permintaan tenaga kerja dengan baik sehingga dapat dijelaskan dengan fungsi produksi.

Fungsi produksi :

$$Q = f(K, L)$$

Keterangan :

K = capital atau modal

L = labor atau tenaga kerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja :

1. Perubahan tingkat upah

Jika tingkat upah naik maka perusahaan dalam kegiatan produksi akan menggantinya dengan teknologi daripada menambah tenaga kerja, karena apabila upah naik akan berpengaruh terhadap biaya produksi yang menjadi semakin tinggi sehingga konsumen akan mengurangi konsumsi mereka terhadap barang tersebut karena harga barang menjadi mahal. Sebaliknya jika tingkat upah turun maka biaya produksi juga akan turun sehingga konsumen akan menambah konsumsi mereka terhadap barang.

2. Perubahan permintaan pasar adalah Jika permintaan konsumen atas barang dan jasa meningkat, maka kapasitas produksi juga akan meningkat. Sehingga perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

3. Harga barang modal turun

Jika harga modal turun, maka biaya produksi perusahaan juga akan turun sehingga harga jual akan barang dan jasa produksi mengalami penurunan. Dengan kondisi ini perusahaan akan meningkatkan produksi mereka karena permintaan barang dan jasa dari konsumen meningkat. Peningkatan dalam kegiatan produksi ini akan meningkatkan permintaan jumlah tenaga kerja.

Permintaan tenaga kerja dibedakan menjadi 2 yaitu, permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek dan permintaan tenaga kerja dalam jangka Panjang. Dalam permintaan jangka pendek, variable modal dalam faktor produksi dianggap tetap dalam artian perusahaan tidak dapat merubah

penggunaan jumlah modal sedangkan yang dapat diubah hanyalah penggunaan tenaga kerja yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dengan kata lain untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya produksi. Sedangkan dalam permintaan tenaga kerja jangka panjang faktor input seperti modal perusahaan dapat melakukan perubahan dalam menambah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

2.2.4 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan pada tingkat upah dan jangka waktu tertentu (Sholeh, 2007). Di dalam lapangan pekerjaan permintaan dan penawaran tenaga kerja memiliki peran dalam penentuan upah. Jika di pasar tenaga kerja penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan akan tenaga kerja, hal ini akan mempengaruhi upah menjadi rendah. Sebaliknya jika penawaran tenaga kerja lebih sedikit dibanding permintaan tenaga kerja maka upah akan cenderung tinggi (Nunung, 2018). Upah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah.

2.2.5 Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Dalam kegiatan usaha, investasi memiliki peranan penting. Investasi dilakukan oleh perusahaan guna membeli barang modal dan perlengkapan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa. Meningkatnya kemampuan produksi inilah yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan profit yang lebih besar.

Menurut Sukirno (2001) investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan modal perusahaan yang digunakan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk meningkatkan output dalam proses produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Investasi dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan modal sehingga dapat menghasilkan produksi barang dan jasa dimasa depan. Investasi juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan

menanamkan modal saat ini dengan harapan pada kemudian hari akan mendapatkan manfaatnya (Faisal, dkk, 2007).

Menurut Todaro (2003) untuk mencapai pembangunan ekonomi maka diperlukan adanya akumulasi modal. Akumulasi modal bisa berupa pembelian peralatan, tanah, dan sumber daya manusia. Akumulasi modal akan berdampak terhadap besarnya output dan pendapatan di masa depan. Investasi pada bidang sumber daya manusia akan menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan produktif sehingga akan memperlancar kegiatan produksi.

Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat dilakukan dengan cara kegiatan investasi, Investasi juga dinilai dapat menaikkan standar hidup masyarakat (Mankiw, 2003). Investasi sendiri terdapat dua macam yaitu investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi swasta dapat dilihat dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diartikan sebagai kegiatan menanam modal yang diperuntukan untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing. Penanaman Modal Asing penting bagi Indonesia guna mendorong laju pertumbuhan perekonomian Indonesia. Adanya Penanaman Modal Asing akan mendorong munculnya industri pasokan bahan baku lokal, terjadi transfer teknologi dan manajemen, perkembangan kolaborasi yang saling menguntungkan antara investor asing dan lokal, serta meningkatkan kegiatan usaha yang berorientasi untuk melakukan ekspor.

Pengertian modal dalam negeri dan modal asing tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2 pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007. Pasal 1 yang berisikan tentang modal dalam negeri berasal dari perseorangan masyarakat

Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah. Dalam pasal 2 menjelaskan bahwa penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung.

2.2.5.1 Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal

Undang – undang RI Nomor 25 Tahun 2007 pasal 3 ayat 2 tentang penanaman modal

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- Menciptakan lapangan kerja
- Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- Meningkatkan daya saing pada bidang usaha nasional
- Meningkatkan dan mengembangkan teknologi nasional
- Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- Mengelola ekonomi potensial menjadi sumber kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2.2.5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Investasi

Teori Keynes mengatakan bahwa suku bunga merupakan faktor yang cukup penting bagi para investor dalam menentukan investasi. Apabila suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam uang kepada bank, pinjaman inilah yang akan digunakan untuk melakukan investasi. Ramalan perkembangan ekonomi masa depan juga menjadi penentu dalam berinvestasi, jika perekonomian masa depan diramalkan akan tumbuh cepat, dan tingkat suku bunga tinggi, para pengusaha akan banyak melakukan investasi. Pendapatan nasional perkapita dan PDRB per kapita mencerminkan tingkat daya beli yang dilakukan oleh masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat maka para investor akan tertarik untuk berinvestasi di Negara atau daerah tersebut. Faktor lain yang menentukan besaran investasi yang dilakukan investor adalah kegiatan para pengusaha

untuk menggunakan teknologi baru dalam proses produksinya. Kegiatan para pengusaha menggunakan teknologi dalam proses produksinya dinamakan berinovasi. Semakin banyak inovasi yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat investasi yang akan tercapai. Birokrasi perizinan juga menjadi faktor penentu tingkat investasi karena birokrasi yang panjang dan rumit akan berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan oleh investor (Nugroho, 2008).

2.2.5.3 Hubungan PMA, PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja

Investasi memiliki peran yang sangat penting terhadap produksi di suatu daerah karena investasi menjadi salah satu penggerak perekonomian. Besar kecilnya penanaman modal akan mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi sehingga nantinya dapat meningkatkan kesempatan kerja. Menurut Harrod-Domar investasi selain dapat menciptakan permintaan tetapi juga dapat meningkatkan output produksi. Investasi adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan investasi mampu meningkatkan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang (Mankiw, 2003). Berdasarkan penjelasan di atas investasi memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.2.6 Teori Upah

Upah adalah harga dari jasa tenaga kerja yang menghasilkan suatu barang dan jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang berdasarkan kesepakatan, kontrak kerja dan peraturan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah diartikan sebagai hak yang diterima pekerja yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas kegiatan dalam memproduksi barang dan jasa yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan, yang dibayarkan menurut kontrak kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan pekerja dan keluarganya.

Dalam melakukan pekerjaan seorang pekerja upah tinggi bukan menjadi hal yang mereka harapkan, melainkan seberapa banyak kebutuhan yang dapat mereka penuhi dengan upah yang diterima. Menurut Sukirno (1997) upah dibedakan menjadi 2, yaitu: Upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah sejumlah uang yang diperoleh pekerja dari perusahaan atas imbalan untuk tenaga mental serta fisik yang telah dipergunakan dalam proses produksi. Upah riil adalah tingkat upah yang diperoleh pekerja yang dihitung berdasarkan kemampuan upah tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup para pekerja dalam pembelian barang dan jasa.

2.2.6.1 Teori Adam Smith

Menurut Adam Smith tingkat upah ditentukan oleh besar kecilnya tingkat permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pada teori ini menjelaskan jika terjadi kenaikan tingkat upah, maka akan menurunkan permintaan tenaga kerja sehingga terjadi pengangguran. Sebaliknya jika tingkat upah mengalami penurunan, kesempatan kerja justru akan meningkat.

2.2.6.2 Teori David Ricardo

David Ricardo mengartikan upah sebagai balasan atas jasa bagi tenaga kerja untuk bertahan hidup. Teori ini menyatakan bahwa upah pekerja tergantung dengan kebutuhan minimum yang diperlukan para pekerja untuk bertahan hidup. Dalam teorinya David Ricardo mengatakan apabila standar hidup para pekerja meningkat tentu seharusnya tingkat upah juga ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu mengantisipasi perubahan perekonomian secara menyeluruh pada suatu daerah maupun negara.

Berbeda dengan upah minimum regional yang memiliki hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya Upah Minimum Regional (UMR) pada setiap tahunnya akan menyebabkan biaya produksi perusahaan akan mengalami pembengkakan dan juga laba yang diterima juga mengalami penurunan. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan industri, sehingga perusahaan mengatasi hal tersebut dengan

cara mengurangi tenaga kerja untuk menghemat biaya produksi sehingga laba optimum perusahaan dapat tercapai.

2.2.7 Upah Minimum

Upah minimum merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya eksploitasi tenaga kerja pada pasar monopoli terlebih lagi pada pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang cukup atau *low skilled*. Dalam jangka panjang pemberlakuan upah minimum justru akan mengurangi permintaan tenaga kerja karena banyak perusahaan yang tidak sanggup mencukupi kebijakan upah minimum sehingga tidak dapat bersaing dengan perusahaan lainya.

Pemberlakuan upah minimum biasanya diperuntukan bagi kelompok pekerja tertentu yang mendapat perlindungan hukum upah minimum. Kebijakan upah minimum di Indonesia dijelaskan dalam UU ketenagakerjaan. Menurut pasal 23 ayat (1) dan (2) PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, upah minimum ialah upah bulanan minimum yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tunjangan tetap ialah suatu jumlah imbalan yang diterima oleh pekerja pada setiap bulanya yang tidak dikaitkan dengan jumlah kehadiran atau pencapaian prestasi. Adanya penetapan upah minimum pemerintah berharap agar pekerja memperoleh penghasilan yang layak, serta kesejahteraan hidup pekerja dapat diperbaiki, mendorong produktivitas pekerja, sehingga daya beli masyarakat meningkat hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Feriyanto, 1997).

Upah minimum terdiri dari 2 yaitu, upah minimum regional dan upah minimum sektoral, yaitu Upah Minimum Regional dan Upah Minimum Sektoral. Upah minimum regional merupakan upah pokok dan tunjangan untuk pekerja yang kurang memiliki keterampilan atau *low skilled* dan memiliki masa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di daerah tertentu. Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku pada suatu Provinsi berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh sektoral tersebut.

2.2.7.1 Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi yang disingkat menjadi UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah satu provinsi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Upah minimum provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. UMP dijadikan sebagai standar minimum pengupahan bagi pengusaha dalam memberikan upah kepada para pekerja yang disesuaikan berdasarkan ketentuan provinsi dimana perusahaan itu berada.

Proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang pertama kali dilakukan yaitu dengan membentuk tim survei. Tim survei akan turun ke lapangan untuk mencari informasi terkait harga barang kebutuhan tenaga kerja dari berbagai kota dalam satu provinsi. Setelah menemukan angka yang Kebutuhan Hidup Layak, Dewan Pengupahan Daerah akan menghitung nilai UMP di provinsi tersebut yang kemudian diusulkan kepada Gubernur, yang selanjutnya Gubernur akan meneruskannya kepada Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja selanjutnya akan menyerahkan usulan UMP tersebut kepada Dewan Pengupahan Nasional (DPN) untuk selanjutnya disahkan. Penetapan Upah Minimum Provinsi dilakukan setiap tahun dan dalam penetapannya selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

2.2.7.2 Hubungan Upah Minimum dan Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan teori permintaan tenaga kerja upah adalah harga dari tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Tingkat upah minimum yang meningkat perusahaan akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, dengan peningkatan upah ini akan diikuti dengan meningkatnya harga per unit barang yang diproduksi. Terjadinya kenaikan harga ini akan mempengaruhi konsumsi konsumen. Sebaliknya jika tingkat upah rendah

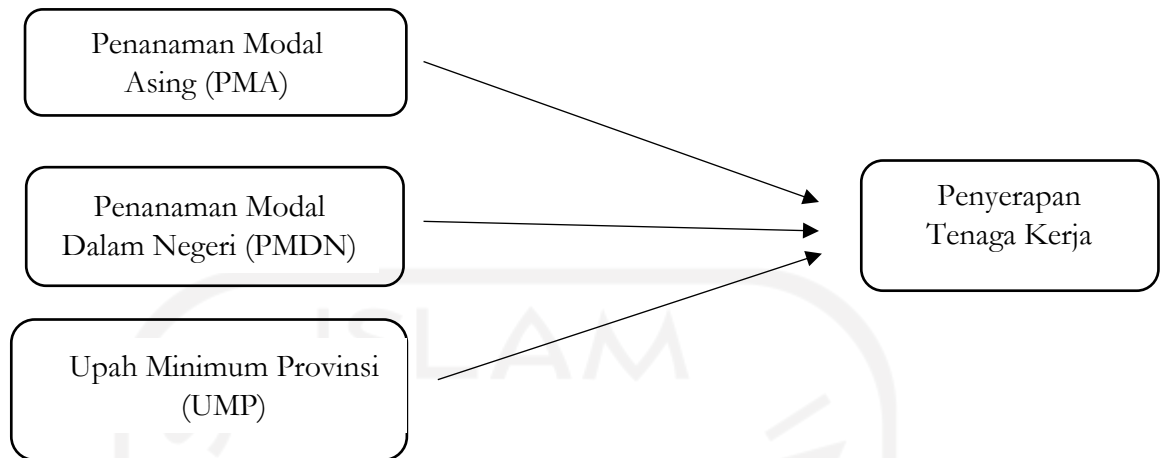
perusahaan akan menambah tenaga kerja karena biaya produksi menjadi murah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjadi bagian dari tinjauan pustaka yang berisikan ringkasan dari seluruh landasan teori dalam penelitian ini yang dituangkan ke dalam bentuk skema singkat. Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini antara lain :

Variabel pertama dan kedua adalah investasi, investasi terdiri dari dua macam sumber yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi merupakan sebuah pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset atau barang modal yang dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Investasi dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.

Variabel ketiga adalah upah minimum, upah minimum adalah batas upah terendah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada para pekerja yang berlaku daerah perusahaan itu berada. Variabel upah dianggap dapat mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja, semakin tinggi upah maka perusahaan akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja. Untuk memperjelas pengaruh antara variabel X dan Y dalam penelitian ini maka disajikan gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian secara teoritis. Maka dari itu, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.
2. Diduga bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.
3. Diduga bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Cara Pengumpulan data

3.1.1 Jenis dan Sumber Data

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dan berupa data olahan. Data sekunder ini diperoleh dari laporan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan dari *time series* yang memuat data antar waktu diambil pada tahun 2005-2020 dan *cross section* yang diambil dari 6 Provinsi yang ada di Pulau Jawa yang terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Banten.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, Data yang digunakan berupa:

1. Data Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa tahun 2005-2020.
2. Data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa tahun 2005-2020.
3. Data Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa tahun 2005-2020.
4. Data Jumlah orang yang bekerja di Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa tahun 2005-2020.

3.1.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi tidak langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mengunduh data yang diperlukan melalui website Badan Pusat

Statistik. Adapun situs yang digunakan adalah <http://bps.go.id/> . Metode lain yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka yang dimana dengan mengumpulkan informasi melalui catatan, jurnal, artikel maupun penelitian terdahulu serta berbagai teknik lain yang relevan dengan penelitian ini.

3.2 Definisi Variabel Operasional

Dalam penelitian ini variabel terbagi menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen ialah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel- variabel independen, sedangkan variabel independen ialah variabel yang menjelaskan atau yang mempengaruhi variabel dependennya.

3.2.1 Variabel Terikat (Dependen Variabel)

Variabel dependen atau yang disebut juga sebagai variabel terikat adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. Penyerapan Tenaga Kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Data penyerapan tenaga kerja diperoleh dari data penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2005-2020. Penyerapan Tenaga Kerja dalam penelitian ini dilambangkan sebagai Y dalam satuan jiwa.

3.2.2 Variabel Bebas (Independen Variabel)

Variabel independen adalah jenis variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain atau yang disebut variabel bebas. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Data variabel independen yang digunakan dalam penelitian dimulai dari tahun 2005 sampai 2020.

1. Penanaman Modal Asing (PMA) (X1)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan menggunakan modal asing. Data Penanaman Modal Asing (PMA) yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005-2020 dalam satuan juta USD.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (X2)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dengan menggunakan modal dalam negeri. Data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005-2020 dalam satuan milyar rupiah.

3. Upah Minimum Provinsi (UMP) (X3)

Upah minimum diartikan sebagai batas minimum yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana perusahaan itu berada. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021.

Upah adalah suatu imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas jasa yang telah dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan persetujuan dan kontrak kerja termasuk tunjangan baik untuk karyawan maupun keluarganya. Data Upah Minimum Provinsi (UMP) yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005-2020 dalam satuan rupiah.

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan E-views 9 untuk mengetahui hubungan antar variabel

dependen yaitu penyerapan tenaga kerja dengan variabel independen yaitu Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Data panel merupakan gabungan antara data *cross-section* dengan data *time series*.

Menurut Gujarati (2013), penggunaan data panel dalam penelitian memiliki kelebihan dibandingkan dengan jenis data *cross section* maupun *time series*.

1. Gabungan antara *cross section* dan *time series* membuat data panel dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan lebih informatif.
2. Data panel membuat data menjadi berjumlah besar dan dapat mengurangi kolinearitas antar variabel – variabel serta lebih efisien.
3. Data panel dapat mempermudah penyelesaian yang baik dalam invers perubahan dinamis dibandingkan dengan data *cross section*.

Model regresinya dalam bentuk linier adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

Y = Jumlah Orang yang bekerja

I = Provinsi di Pulau Jawa

t = waktu (tahun 2005-2020)

μ = Variabel pengganggu

X1 = Penanaman Modal Asing (PMA)

X2 = Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

X3 = Upah Minimum Provinsi (UMP)

Menurut Gujarati (2013) dalam regresi data panel terdapat tiga model pendekatan yaitu :

1. Model *Common Effect*

Merupakan teknik yang paling sederhana yang disebut model *common effect* atau OLS (*Ordinary Least Square*) dimana dengan menggabungkan

data *time series* dan *cross section* (Widarjono, 2009). Pada model ini diasumsikan bahwa intersep baik antar waktu maupun antar individu adalah sama.

2. Model *Fixed Effect*

Teknik pendekatan yang digunakan untuk memperhatikan unit *cross section* pada model regresi data panel dengan cara memperoleh nilai intersep dari setiap unit *cross section* yang berbeda-beda namun masih berasumsi bahwa slope koefisien tetap. Metode *fixed effect* sering disebut juga metode *Least Square Dummy Variabel* (LSDV)

3. Model *Random Effect*

Dalam model *random effect* perbedaan antar individu dan periode waktu digambarkan melalui *error*. Pada model ini juga memperhitungkan korelasi antara *error* yang terjadi sepanjang *time series* dan *cross section*. Model estimasi ini sering juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM).

3.3.1 Pemilihan Model Estimasi

Dalam pemilihan model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini diperlukan pengujian dengan tiga pendekatan, yaitu: model *Common Effect*, model *Fixed Effect*, dan model *Random effect*. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu melakukan regresi dengan menggunakan model *Common Effect* dan model *Fixed Effect*, tahap selanjutnya yaitu melakukan uji Chow sehingga didapat hasil regresi yang terbaik dari kedua model tersebut. Apabila model *Fixed Effect* yang terpilih menjadi model terbaik maka diperlukan uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara model *Fixed Effect* dengan model *Random effect*.

- Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian guna memilih model terbaik antara model *Common Effect* atau *Fixed* yang akan digunakan dalam estimasi data panel. Hipotesis dalam uji Chow adalah:

H0: Memilih model *Common Effect*

H1: Memilih model *Fixed Effect*

Untuk melakukan uji pemilihan antara dua model ini dilakukan dengan melihat nilai p-value. Ketika nilai p-value lebih kecil dari alfa 5% sehingga menolak H0 artinya uji yang tepat digunakan dalam uji ini adalah model *Fixed Effect*. Sebaliknya jika nilai p-value lebih besar dari alfa 5% maka menerima H0 artinya model yang digunakan adalah *Common Effect*.

- Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian guna memilih model terbaik antara model *Fixed Effect* atau *Random effect*. Hipotesis dalam uji hausman adalah:

H0: Memilih model *Random effect*

H1: Memilih model *Fixed Effect*

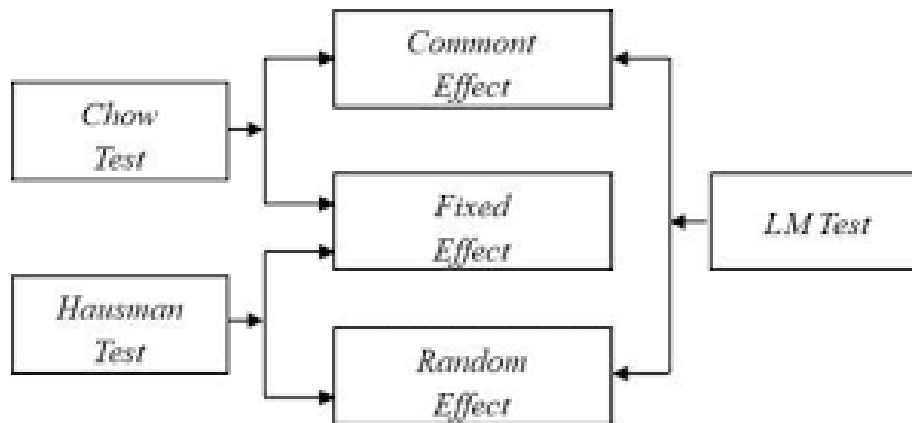
Nilai p-value digunakan untuk memilih uji manakah yang paling tepat. Apabila nilai p-value lebih kecil dari alfa 5% sehingga menolak H0 artinya uji yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect*. Tetapi jika nilai p-value lebih besar dari alfa 5% maka menerima H0 artinya uji yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model *Random effect*.

- Uji Lagrange Multiplier

H0: Memilih model *Common Effect*

H1: Memilih model *Random effect*

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih antara dua model ini dilakukan dengan membandingkan nilai p-value dengan alfa. Apabila nilai p-value lebih kecil dari alfa 5%, sehingga menolak H0, artinya model *random effect* lebih layak digunakan dalam estimasi regresi data panel. Sedangkan apabila nilai p-value lebih besar dari alfa 5% maka menerima H0, artinya model *common effect* lebih layak digunakan dalam estimasi regresi data panel.



Gambar 3.1 Pengujian Pemilihan Model

3.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan sebagai acuan dalam mengetahui seberapa besar proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh seluruh variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol sampai satu.

3.3.3 Uji F Statistik (Pengujian variabel secara menyeluruh)

Uji F Statistik digunakan untuk menunjukan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Hipotesis dalam uji F statistik sebagai berikut:

- Hipotesis :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 = 0$, artinya memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

- Menentukan besarnya nilai F hitung dan signifikansi F (sig-F)

- Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 1%,5%,10%
- Pengambilan keputusan :

Jika nilai F hitung lebih besar dari (α) 0,01 0,05 0,10 maka menerima H_0 , artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Jika nilai F hitung lebih kecil dari (α) 0,01 0,05 0,10 maka menolak H_0 , artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

3.3.4 Uji t Statistik (Pengujian variabel secara individu)

Uji t statistik digunakan untuk menunjukan pengaruh signifikan atau tidak signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau individu. Uji t statistik digunakan sebagai perbandingan nilai probabilitas t-statistik dengan α (alpha). Hipotesis dalam uji t statistik sebagai berikut:

Jika t hitung $>$ t tabel, maka menolak H_0 dan menerima H_a , artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara individu. Jika t hitung $<$ t tabel, maka menerima H_0 dan menolak H_a , artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara individu. Maka dapat disimpulkan :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0 > 0$, artinya variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu.

Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5% ($\alpha=0,05$), maka posisi penolakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Hipotesis satu arah
Posisi penolakan berada pada salah satu sisi, baik itu sisi kiri (berarti negatif) dan sisi kanan (berarti positif), maka batas

daerah penolakan tetap sebesar 5% karena tidak dibagi menjadi dua sisi.

- Hipotesis satu sisi positif

$H_0 : \beta_i \leq 0$, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap variabel dependen secara individu.

$H_1 : \beta_i > 0$, artinya variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap variabel dependen secara individu.

- Hipotesis satu sisi negatif

$H_0 : \beta_i \leq 0$, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap variabel dependen secara individu.

$H_1 : \beta_i > 0$, artinya variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap variabel dependen secara individu.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Data

Penjelasan mengenai data-data dari hasil penelitian yang berhubungan dengan variabel penelitian yang digunakan akan dijelaskan dengan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari 6 Provinsi yang berada di Pulau Jawa untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja pada periode tahun 2005-2020 dengan jumlah observasi sebanyak 96.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variable	Penyerapan tenaga kerja (jiwa)	Penanaman Modal Asing (Juta USD)	Penanaman Modal Dalam Negeri (Milyar Rupiah)	Upah Minimum Provinsi (Rupiah)
Mean	10696314	2149,252	14793,9	1194610
Median	8432262	1690,8	9131,25	932307
Maximum	22068407	9927,6	62094,8	4276349
Minimum	1280898	0,8	275,8	340000
Std. Dev.	7389410	2058,191	15634,28	788220,5
Observations	96	96	96	96

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9

Pada Tabel 4.1 nilai maksimal menunjukkan nilai tertinggi dari setiap variabel, nilai minimum menunjukkan nilai terendah dari setiap variabel, nilai *mean* menunjukkan nilai rata-rata dari setiap variabel, dan standar deviasi menunjukkan besaran perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-ratanya.

Analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan selama periode 2005-2020 rata –rata variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja sebesar

10.696.314 jiwa. Pada variabel independen rata –rata tertinggi dialami oleh variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 1.194.610 rupiah. Sedangkan rata –rata terendah dialami oleh variabel Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu sebesar 2149,252 juta USD. Sedangkan nilai tengah tertinggi dari variabel independen yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu sebesar 932.307 rupiah dan nilai tengah terendah terdapat pada variabel Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu sebesar 1690,8 juta USD.

Nilai maksimum tertinggi secara keseluruhan terdapat pada variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja sebesar 22.068.407 jiwa. Sedangkan berdasarkan variabel independen nilai maksimum tertinggi terdapat pada variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu sebesar 4.276.349 rupiah dan nilai maksimum terendah terdapat pada variabel Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu sebesar 9927,6 juta USD. Gabungan antara variabel dependen dengan variabel independen menunjukkan bahwa nilai minimum tertinggi terdapat pada variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja sebesar 1.280.898 jiwa. Sedangkan nilai minimum tertinggi berdasarkan variabel independen yaitu terdapat pada variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu sebesar 340.000 rupiah dan nilai maksimum terendah terdapat pada variabel Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu sebesar 0,800000 juta USD.

Nilai standar deviasi tertinggi secara keseluruhan terdapat pada variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja sebesar 7.389.410 jiwa. Sedangkan nilai standar deviasi tertinggi berdasarkan variabel bebas yaitu terdapat pada variabel upah minimum provinsi yaitu sebesar 788.220,5 rupiah dan nilai maksimum terendah terdapat pada variabel Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu sebesar 2058,191 juta USD.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Hasil Uji Chow

Pengujian antara model *common effect* dengan model *fixed effect* yang digunakan untuk memilih model terbaik antara 2 model tersebut dengan menggunakan Uji Chow dengan uji hipotesis berikut:

H_0 : menentukan menggunakan estimasi model *common effect*

H_a : menentukan menggunakan estimasi model *fixed effect*

Dalam pemilihan model terbaik yaitu dengan melihat nilai p-value. Apabila nilai p-value lebih kecil dari α 5% maka uji yang tepat digunakan adalah *fixed effect*. Sedangkan jika nilai p-value lebih besar dari α 5% maka uji yang terbaik digunakan adalah *random effect*.

Tabel 4.2
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	331.191199	(5,87)	0.0000
Cross-section Chi-square	287.753249	5	0.0000

Sumber : Hasil Olahan data Eviews 9

Berdasarkan hasil pengujian dengan uji chow didapat nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 yang artinya nilai p-value lebih kecil daripada α 5%, sehingga kesimpulan yang diperoleh dari uji chow adalah menolak H₀, sehingga model terbaik yang dipilih yaitu *fixed effect*.

4.2.2 Hasil Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara model *Random Effect* dengan model *Fixed Effect*. Dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀ : Menentukan dengan estimasi model *Random Effect*

H_a : Menentukan dengan estimasi model *fixed effect*

Tabel 4.3
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.863387	3	0.0049

Sumber : Hasil Olah data Eviews 9

Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh nilai probabilitas dalam uji Hausman sebesar 0,0049 lebih kecil dari α 5% ($0,0049 < 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa menolak H₀ yang artinya model terbaik yang digunakan dalam estimasi penelitian ini adalah *fixed effect* model.

4.2.3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Tabel 4.4
Model Fixed effect

Dependent Variable: PTK
Method: Panel Least Squares
Date: 03/03/22 Time: 15:16
Sample: 2005 2020
Periods included: 16
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 96

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8778401.	333368.7	26.33241	0.0000
PMA	433.0813	100.8238	4.295428	0.0000
PMDN	50.16725	15.40370	3.256830	0.0016
UMP	0.205040	0.318398	0.643973	0.5213
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.977824	Mean dependent var	10696314	
Adjusted R-squared	0.975785	S.D. dependent var	7389410.	
S.E. of regression	1149876.	Akaike info criterion	30.83727	
Sum squared resid	1.15E+14	Schwarz criterion	31.07767	
Log likelihood	-1471.189	Hannan-Quinn criter.	30.93444	
F-statistic	479.5261	Durbin-Watson stat	1.672343	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olah data Eviews 9

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda dengan menggunakan alat analisis E-views 9, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Model regresi *fixed effect* pada penyerapan tenaga kerja:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

$$PTK = 8778401 + 433,0813 PMA + 50,16725 PMDN + 0,205040 UMP + \mu_{it}$$

R-Square	= 0,977824
Adjusted R-Squared	= 0,9755785
Durbin-Watson stat	= 1,672343
F-statistic	= 0,000000

Keterangan :

Y = Jumlah Orang yang Bekerja

I = Provinsi di Pulau Jawa

t = waktu (tahun 2005-2020)

μ = Variabel pengganggu

β_0 = Koefisien Intersep

β_1 = Koefisien Pengaruh X1 (Penanaman Modal Asing)

β_2 = Koefisien Pengaruh X2 (Penanaman Modal Dalam Negeri)

β_3 = Koefisien Pengaruh X3 (Upah Minimum Provinsi)

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1 Koefisien Determinasi R²

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji regresi berganda dengan model *fixed effect* didapat nilai R-Squared sebesar 0,977824, Artinya bahwa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) mampu menjelaskan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa sebesar 97,82 % dan sisanya sebesar 2,18 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.3.2 Hasil Uji F Statistik

Uji F Statistik merupakan pengujian untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan pada uji F statistik dengan membandingkan nilai probabilitas F-statistik dengan nilai α 5%. Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,00000 signifikan terhadap α 5% (0,05), sehingga menolak H₀. Artinya variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.

4.3.3 Hasil Uji t Statistik

Uji t Statistik pada dasarnya menunjukkan pengaruh antara variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Membandingkan nilai probabilitas T-statistik dengan nilai α 5% (0,05) sehingga dapat diketahui kesimpulannya menolak atau menerima hipotesis.

Tabel 4.5
Estimasi Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Uji Signifikansi	Keterangan
PMA	433,0813	0,0000	Satu sisi	Signifikan
PMDN	50,16725	0,0008	Satu sisi	Signifikan
UMP	0,205040	0,26065	Satu sisi	Tidak Signifikan

1. Variabel Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil analisis dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai probabilitas variabel Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 0,00000 lebih kecil dari α 5% (0,05) menolak H_0 . Artinya bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA) secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.

2. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil analisis dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai probabilitas variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 0,0008 lebih kecil dari α 5% (0,05) maka menolak H_0 . Artinya bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.

3. Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.

Menurut hasil analisis dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai probabilitas variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 0,26065 lebih besar dari α 5% (0,05) maka gagal menolak H_0 . Dapat diartikan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.

4.4 Interpretasi Hasil Regresi

Nilai koefisien dari hasil regresi dengan model *fixed effect* pada Tabel 4.4 maka dapat disimpulkan bahwa :

$$\text{PTK} = 8778401 + 433,0813 \text{ PMA} + 50,16725 \text{ PMDN} + 0,205040 \text{ UMP} + \mu_{it}$$

1. Penanaman Modal Asing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan diperoleh nilai koefisien variabel penanaman modal asing sebesar 433,0813 dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya ketika variabel penanaman modal asing mengalami peningkatan sebesar 1 juta USD maka variabel penyerapan tenaga kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa juga akan meningkat secara signifikan sebesar 433,0813 jiwa

2. Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan diperoleh nilai koefisien penanaman modal dalam negeri sebesar 50,16725 dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. Artinya ketika variabel penanaman modal dalam negeri mengalami peningkatan sebesar 1 milyar rupiah maka variabel penyerapan tenaga kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa juga akan meningkat secara signifikan sebesar 50,16725 jiwa

3. Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 0,205040 dan tidak

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.

4.5 Analisis antar Provinsi di Pulau Jawa

Berdasarkan data yang diolah menggunakan program analisis Eviews 9, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam nilai intersep dari masing-masing Provinsi yang berada di Pulau Jawa. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini.

Tabel 4.6
Nilai Intersep

Provinsi	Penyerapan Tenaga Kerja	Koefisien Regresi	Daerah Konstan
DKI Jakarta	-7634607	8778401	1.143.794
Jawa Barat	6351073	8778401	15.129.474
Jawa Tengah	6281362	8778401	15.059.763
DIY	-7301503	8778401	1.476.898
Jawa Timur	8177484	8778401	16.955.885
Banten	-5873810	8778401	2.904.591

Dalam menginterpretasikan hasil regresi data panel dengan menggunakan model *fixed effect*. Kondisi penyerapan tenaga kerja di Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa dilihat dari nilai intersepnya dapat dikatakan pada setiap Provinsi di Pulau Jawa terdapat perbedaan. Pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur sebesar 16.955.885 jiwa dan tingkat penyerapan tenaga kerja terendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 1.143.794 jiwa.

4.6 Pembahasan

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect*. Berdasarkan pengujian dengan model *fixed effect* hasil menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan pada penanaman modal asing akan

mengakibatkan kenaikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dilihat dari data Penanaman Modal Asing Provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2005 dan 2020 (lampiran 8) mengalami kenaikan di Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata sebesar 3.440,1 juta US\$, Provinsi Jawa Barat 3.677,6 juta US\$, Provinsi Jawa Tengah sebesar 693,8 juta US\$, Provinsi DI Yogyakarta sebesar 686,7 juta US\$, Provinsi Jawa Timur sebesar 1.138,9 juta US\$, dan Provinsi Banten sebesar 1.405,9 juta US\$ dan penyerapan tenaga kerja pada tahun yang sama juga mengalami kenaikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Feriyanto, N & Sriyana, J. (2016) dan Budiriansyah, L., Tarmizi, N., & Soebyakto, B. B (2018) yang menyimpulkan bahwa penanaman modal asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 33 Provinsi di Indonesia. Adanya peningkatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) akan meningkatkan jumlah barang modal, sehingga output perusahaan akan meningkat. Peningkatan penanaman modal asing juga akan membuka lapangan pekerjaan baru sehingga permintaan tenaga kerja meningkat dan penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat.

Selanjutnya diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. Dilihat dari data Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2005 dan 2020 (lampiran 8) mengalami peningkatan di Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata sebesar 22.750,4 milyar rupiah, Provinsi Jawa Barat sebesar 27.402,9 milyar rupiah, Provinsi DI Yogyakarta sebesar 15.796,3 milyar rupiah, Jawa Tengah sebesar 20.046 milyar rupiah, Provinsi Jawa Timur sebesar 29.858,8 milyar rupiah, dan Provinsi Banten sebesar 17.489,5 milyar rupiah dan juga penyerapan tenaga kerja pada tahun yang sama juga mengalami kenaikan. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan jumlah penanaman modal dalam negeri dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Semakin besar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga akan berdampak kepada

peningkatan permintaan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga penyerapan tenaga kerja juga akan semakin banyak di Provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Hal tersebut telah sesuai dengan teori dan hipotesis yang diajukan dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Feriyanto, N & Sriyana, J (2016) dan Budiriansyah, L., Tarmizi, N., & Soebyakto, B. B (2018) yang menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Nilai investasi baik yang bersumber Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki peran yang penting untuk menunjang dan mempercepat perluasan lapangan tenaga kerja, karena investasi mempunyai daya serap yang tinggi terhadap tenaga kerja sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sadono Sukirno (2000) bahwa kegiatan investasi memungkinkan masyarakat untuk terus menerus meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Investasi yang mengalami peningkatan, tentu berpengaruh terhadap produksi perusahaan juga akan meningkat yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga akan menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Dikarenakan investasi baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan pada sektor padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Kemudian hasil dari analisis variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Feriyanto, N dan & Sriyana, J (2016), Wihastuti dan Rahmatullah (2018), Jaya, J.T., & Kholilah (2020), dan Pratama, R.P., Muhammad, S., & Silvia, V (2020) yang menyatakan bahwa upah minimum

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, jika dilihat dari data penyerapan tenaga kerja tahun 2016-2020 sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor informal dengan rata-rata sebesar 1.507.540 jiwa di DKI Jakarta, 10.688.487 jiwa di Jawa Barat, 10.566.456 jiwa di Jawa Tengah, 1.144.390 jiwa di DI.Yogyakarta, 12.551.377 jiwa di Jawa Timur, dan 2.302.235 jiwa di Banten (lampiran 9). Provinsi DKI Jakarta lebih sedikit menyerap tenaga kerja sektor informal daripada Provinsi lainnya. Tenaga kerja yang bekerja di sektor informal cenderung tidak terikat dalam peraturan-peraturan pemerintah salah satunya dalam kebijakan pengupahan. Upah pekerja informal sendiri tidak berpatokan terhadap upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan upah minimum tidak mencakup pekerja informal.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan pada enam Provinsi di Pulau Jawa dalam periode 2005-2020 ini membahas pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2005-2020. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan penanaman modal asing dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dikarenakan Penanaman Modal Asing dilakukan pada program padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2005-2020. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan penanaman modal dalam negeri akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dikarenakan Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan pada program padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
3. Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa tahun 2005-2020. Hal ini disebabkan karena penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi di Pulau Jawa sebagian besar berada pada sektor informal, yang dimana pada sektor informal dalam pengupahan tidak berpatokan terhadap upah minimum.

B. Implikasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan implikasi sebagai masukan kepada pihak terkait sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian ini Penanaman Modal Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, maka untuk kedepannya diharapkan penanaman modal dapat dialokasikan lebih banyak untuk program padat karya selain itu saat ini pemerintah telah memberlakukan aturan bagi para perusahaan yaitu dalam membangun usaha syaratnya dalam izin usaha tersebut harus mencantumkan surat keterangan yang 70% tenaga kerja harus diserap dengan mempekerjakan penduduk lokal. Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan investasi baik Penanaman Modal Asing yaitu dengan menciptakan infrastruktur yang memadai, seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air, dan energi, agar dapat menarik lebih banyak investor asing. Selain itu dalam penentuan target penanaman modal pemerintah perlu adanya pemerataan agar seluruh Provinsi di Pulau Jawa merata dalam segi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, maka untuk kedepannya diharapkan penanaman modal dapat dialokasikan lebih banyak untuk program padat karya. Pemerintah diharapkan melakukan peningkatan dalam menciptakan iklim investasi, antara lain melalui peningkatan sarana infrastruktur dan menjadikan peraturan tentang penanaman modal dalam satu paket terpadu dengan peraturan lainnya terkait kegiatan usaha di Indonesia.
3. Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, sehingga Provinsi-Provinsi yang berada di Pulau Jawa masih mempunyai peluang untuk menaikkan besaran upah minimum provinsi. Peraturan yang telah ditetapkan pemerintah saat ini ditulis

dalam pasal 25 PP 36/2021, yang dimana penentuan upah minimum dihitung berdasarkan paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Namun tidak ada jaminan kenaikan upah setiap tahunnya, hal ini dikarenakan adanya aturan penyesuaian upah minimum dilakukan setiap tahunnya yang memperhatikan nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan (pasal 26). Kebijakan pengupahan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga berpengaruh terhadap tingkat kemakmuran. Jika ketimpangan dapat teratasi tingkat kemakmuran semakin bertambah. Selain itu pemerintah diharapkan selalu memperhatikan tingkat kenaikan UMP, karena UMP berpengaruh terhadap kebutuhan hidup tenaga kerja. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terlalu rendah akan merugikan tenaga kerja namun sebaliknya jika Upah Minimum Provinsi (UMP) terlalu tinggi akan merugikan perusahaan. Maka dari itu kebijakan upah minimum perlu disesuaikan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja guna meminimalisir risiko terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan Edisi 5. Yogyakarta. UUP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistika. Statistika Indonesia. Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2005-2020
<https://www.bps.go.id/publication/2021/12/07/ee355feca591c3b6841d361b/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2005-2021.html> , diakses pada tanggal 5 November 2021
- Badan Pusat Statistik. 2021. Upah Minimum Regional/Provinsi 2005-2020. Diakses 1 November 2021, dari <http://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. 2021. Provinsi DIY. 2012-2020
<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/6/272/1/upah-minimum-kabupaten-upah-minimum-provinsi-di-di-yogyakarta.html>, diakses pada tanggal 1 November 2021
- Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Indonesia. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi 2006-2020
<https://www.bps.go.id/indicator/13/1840/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-provinsi.html>, diakses pada tanggal 7 November 2021.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Indonesia. Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi 2006-2020
<https://www.bps.go.id/indicator/13/793/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi-investasi.html> , diakses pada tanggal 7 November 2021.
- Budiriansyah, L., Tarmizi, N., & Soebyakto, B.B. 2018. *Analysis of labor Absorption Province of South Sumatera*. Sriwijaya economics, accounting, and business conference, hal 300-208
- Faisal, Noor, Hendry, 2007. Ekonomi Manajerial. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Febrianty, M., & Juliannisa, I. A. (2021). Penyerapan Tenaga Kerja Di Wilayah DKI

- Jakarta Pada Tahun 1990-2019 JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). 5(3), 253–267.
- Feriyanto, N. (1997). Upah Minimum Regional : Sebuah Tinjauan. *JEP*, 2, 196–204.
- Feriyanto, N & Sriyana, J. (2016). “*Labor Absorption Under Minimum Wage Policy in Indonesia*”. *Regional Science Inquiry*, Vol 8(1), 11-12.
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Gujarati, D. N. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika*, Edisi Kelima. Mangunsong, R.C. penerjemah. Jakarta: Salemba Empat.
- Jaya, J.T., & Kholilah . 2020. *Effect of Gross Domestic Regional Bruto, Provincial Minimum Wage, and Investment on Labor Absorption*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 9(3), 236-249
- Kawet, J.A, dkk. 2019. Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan*, 20(2).
- Kuncoro, Haryo. 2002. Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 45-54.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makro Ekonomi*. Erlangga. Jakarta
- Nugroho, S. (2008). Evaluasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Indonesia Dan Implikasi Kebijakan. *Riptek*, 2(1), 18-21
- Nunung, N.R.(2018). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Pangastuti, Yulia (2015), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah, *EDAJ* , 4(2), 202-212
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

- Prasojo, P. (2009). Analisis Pengaruh Investasi PMA dan PMDN, Kesempatan Kerja, Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB di Jawa Tengah Periode tahun 1980-2006. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Pratama, R.P., Muhammad, S., & Silvia, V. 2020. *Do Minimum Wage and Economic Growth Matter for Labor Absorption in Sumatera Island, Indonesia*. East African Scholars Journal of Economics, Business and Management. 3(1), 54-61
- Ramdani, A.N. dkk. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah 2014-2019. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, 23(2)
- Rimbawan, N.D. (2012). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja Di Provinsi Bali. Piramida, 6(2)
- Romdhoni, A. H. (2017). Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(2), 139.
- Royati, S. (2017). Analisis Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DIY. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Sukirno, Sadono. 1997. Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Edisi 2. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000. Makro Ekonomika Modern, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Sadono Sukirno. 2001. Pengantar Teori Makro Ekonomi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sandika, R. S., Setiawan, D., & Maulida, Y. (2014). Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(2), 1-16.
- Sholeh, M. (2007). Jurnal Ekonomi & Pendidikan , Volume 4 Nomor 2, November 2007. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 4(1), 76-88.

- Simanjuntak, Payaman J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: LPFE UI.
- Todaro, Michael P. dkk. 2003. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs. Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. 2006. Pembangunan Ekonomi edisi kesembilan, jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Wihastuti, L. & Rahmatullah, H. (2018). Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 96–102. dari <https://journal.ugm.ac.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Uji Statistik Deskriptif

	PTK	PMA	PMDN	UMP
Mean	10696314	2149.252	14793.90	1194610.
Median	8432262.	1690.800	9131.250	932307.0
Maximum	22068407	9927.600	62094.80	4276349.
Minimum	1280898.	0.800000	275.8000	340000.0
Std. Dev.	7389410.	2058.191	15634.28	788220.5
Skewness	0.093032	1.063892	1.270734	1.823741
Kurtosis	1.238163	3.965022	3.501565	6.582361
Jarque-Bera	12.55475	21.83494	26.84250	104.5497
Probability	0.001878	0.000018	0.000001	0.000000
Sum	1.03E+09	206328.2	1420215.	1.15E+08
Sum Sq. Dev.	5.19E+15	4.02E+08	2.32E+10	5.90E+13
Observations	96	96	96	96

Lampiran 2 : Hasil Uji Model Common Effect

Dependent Variable: PTK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/03/22 Time: 15:15
 Sample: 2005 2020
 Periods included: 16
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 96

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12723794	972387.7	13.08510	0.0000
PMA	338.1206	273.8964	1.234484	0.2202
PMDN	429.8726	43.82475	9.808900	0.0000
UMP	-7.628997	0.863220	-8.837837	0.0000
R-squared	0.555732	Mean dependent var	10696314	
Adjusted R-squared	0.541245	S.D. dependent var	7389410.	
S.E. of regression	5004954.	Akaike info criterion	33.73053	
Sum squared resid	2.30E+15	Schwarz criterion	33.83738	
Log likelihood	-1615.065	Hannan-Quinn criter.	33.77372	
F-statistic	38.36074	Durbin-Watson stat	0.418303	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3 : Hasil Uji Model Fixed Effect

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 03/03/22 Time: 15:16

Sample: 2005 2020

Periods included: 16

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 96

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8778401.	333368.7	26.33241	0.0000
PMA	433.0813	100.8238	4.295428	0.0000
PMDN	50.16725	15.40370	3.256830	0.0016
UMP	0.205040	0.318398	0.643973	0.5213

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.977824	Mean dependent var	10696314
Adjusted R-squared	0.975785	S.D. dependent var	7389410.
S.E. of regression	1149876.	Akaike info criterion	30.83727
Sum squared resid	1.15E+14	Schwarz criterion	31.07767
Log likelihood	-1471.189	Hannan-Quinn criter.	30.93444
F-statistic	479.5261	Durbin-Watson stat	1.672343
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4 : Hasil Uji Model Random Effect

Dependent Variable: PTK

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/03/22 Time: 15:18

Sample: 2005 2020

Periods included: 16

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 96

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8842114.	1832542.	4.825053	0.0000

PMA	425.2390	100.4193	4.234636	0.0001
PMDN	54.64391	15.34741	3.560464	0.0006
UMP	0.110377	0.317139	0.348041	0.7286
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			4414506.	0.9365
Idiosyncratic random			1149876.	0.0635
Weighted Statistics				
R-squared	0.461112	Mean dependent var	695062.8	
Adjusted R-squared	0.443539	S.D. dependent var	1621992.	
S.E. of regression	1209946.	Sum squared resid	1.35E+14	
F-statistic	26.24061	Durbin-Watson stat	1.438616	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.086334	Mean dependent var	10696314	
Sum squared resid	4.74E+15	Durbin-Watson stat	0.040882	

Lampiran 5 : Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	331.191199	(5,87)	0.0000
Cross-section Chi-square	287.753249	5	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 03/03/22 Time: 15:17

Sample: 2005 2020

Periods included: 16

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 96

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12723794	972387.7	13.08510	0.0000

PMA	338.1206	273.8964	1.234484	0.2202
PMDN	429.8726	43.82475	9.808900	0.0000
UMP	-7.628997	0.863220	-8.837837	0.0000
<hr/>				
R-squared	0.555732	Mean dependent var	10696314	
Adjusted R-squared	0.541245	S.D. dependent var	7389410.	
S.E. of regression	5004954.	Akaike info criterion	33.73053	
Sum squared resid	2.30E+15	Schwarz criterion	33.83738	
Log likelihood	-1615.065	Hannan-Quinn criter.	33.77372	
F-statistic	38.36074	Durbin-Watson stat	0.418303	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6 : Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.863387	3	0.0049

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PMA	433.081322	425.238960	81.406796	0.3847
PMDN	50.167254	54.643910	1.731023	0.0007
UMP	0.205040	0.110377	0.000800	0.0008

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 03/03/22 Time: 15:18

Sample: 2005 2020

Periods included: 16

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 96

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8778401.	333368.7	26.33241	0.0000
PMA	433.0813	100.8238	4.295428	0.0000

PMDN	50.16725	15.40370	3.256830	0.0016
UMP	0.205040	0.318398	0.643973	0.5213

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.977824	Mean dependent var	10696314
Adjusted R-squared	0.975785	S.D. dependent var	7389410.
S.E. of regression	1149876.	Akaike info criterion	30.83727
Sum squared resid	1.15E+14	Schwarz criterion	31.07767
Log likelihood	-1471.189	Hannan-Quinn criter.	30.93444
F-statistic	479.5261	Durbin-Watson stat	1.672343
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7 : Hasil Uji Regresi Data Panel Pada Model Fixed Effect

Dependent Variable: PTK
Method: Panel Least Squares
Date: 03/03/22 Time: 15:16
Sample: 2005 2020
Periods included: 16
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 96

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8778401.	333368.7	26.33241	0.0000
PMA	433.0813	100.8238	4.295428	0.0000
PMDN	50.16725	15.40370	3.256830	0.0016
UMP	0.205040	0.318398	0.643973	0.5213

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.977824	Mean dependent var	10696314
Adjusted R-squared	0.975785	S.D. dependent var	7389410.
S.E. of regression	1149876.	Akaike info criterion	30.83727
Sum squared resid	1.15E+14	Schwarz criterion	31.07767
Log likelihood	-1471.189	Hannan-Quinn criter.	30.93444
F-statistic	479.5261	Durbin-Watson stat	1.672343
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 8 : Data PTK, PMA, dan PMDN tahun 2005 &2020

	PTK (jiwa)		Rata-rata PTK 2005- 2020	PMA (Juta US\$)		Rata- rata PMA 2005- 2020	PMDN (Milyar Rupiah)		Rata- rata PMDN 2005- 2020
Provinsi	2005	2020		2005	2020		2005	2020	
DKI Jakarta	3525575	4914961	4220268	3266,8	3613,3	3440,1	2546	42954,7	22750,4
Jawa Barat	14637107	22068407	18352757	2561,4	4793,7	3677,6	3405,3	51400,5	27402,9
Jawa Tengah	15558350	17760959	16659655	23,9	1363,6	693,8	986,4	30606,1	15796,3
DI Yogyakarta	1734047	2107044	1920546	1363,6	9,7	686,7	30606,1	9485,9	20046,0
Jawa Timur	17679076	21140589	19409833	702,2	1575,5	1138,9	4056,9	55660,6	29858,8
Banten	3286227	5586895	4436561	668,2	2143,6	1405,9	3833,2	31145,7	17489,5

Lampiran 9 : Rata-rata pekerja informal

Rata-rata pekerja informal tahun 2016-2020		Penyerapan tenaga kerja tahun 2016- 2020
Provinsi	rata-rata (jiwa)	rata-rata (jiwa)
DKI Jakarta	1.507.540	4.924.540
Jawa Barat	10.688.487	21.048.320
Jawa Tengah	10.566.456	17.378.045
DI.Yogyakarta	1.144.390	2.087.101
Jawa Timur	12.551.377	20.324.131
Banten	2.302.235	5.426.719

Lampiran 10 : Data Penelitian

Provinsi	Tahun	PTK (Jiwa)	PMA (juta US\$)	PMDN (Milyar Rupiah)	Upah Minimum Provinsi (Rupiah)
DKI Jakarta	2005	3.525.575	3266,8	2546	711.843
DKI Jakarta	2006	3.672.195	1468,4	3088	819.100
DKI Jakarta	2007	3.062.656	4676,9	4218	900.560
DKI Jakarta	2008	4.123.471	9927,6	1837,3	972.604
DKI Jakarta	2009	4.152.673	5510,8	9693,8	1.069.865
DKI Jakarta	2010	4.449.333	6429,3	4598,5	1.118.009
DKI Jakarta	2011	4.527.771	4824,1	9256,4	1.290.000

DKI Jakarta	2012	4.765.343	4107,7	8540,1	1.529.150
DKI Jakarta	2013	4.671.634	2591,1	5754,5	2.200.000
DKI Jakarta	2014	4.656.604	4509,4	17811,5	2.441.000
DKI Jakarta	2015	4.904.279	3619,4	15512,7	2.700.000
DKI Jakarta	2016	4.933.190	3398,2	12216,9	3.100.000
DKI Jakarta	2017	4.839.168	4595	47262,3	3.355.750
DKI Jakarta	2018	4.932.932	4857,7	49097,4	3.648.035
DKI Jakarta	2019	5.002.450	4123	62094,8	3.940.973
DKI Jakarta	2020	4.914.961	3613,3	42954,7	4.276.349
Jawa Barat	2005	14.637.107	2561,4	3405,3	408.260
Jawa Barat	2006	14.986.799	1619,3	5314,4	447.654
Jawa Barat	2007	11.486.796	1326,9	11347,9	516.840
Jawa Barat	2008	16.322.615	2552,2	4289,5	568.193
Jawa Barat	2009	16.844.447	1934,4	4724,9	628.191
Jawa Barat	2010	17.062.626	1692	15799,8	671.500
Jawa Barat	2011	17.813.912	3839,4	11194,3	732.000
Jawa Barat	2012	18.464.506	4210,7	11384	780.000
Jawa Barat	2013	18.707.216	7124,9	9006,1	850.000
Jawa Barat	2014	19.337.363	6562	18726,9	1.000.000
Jawa Barat	2015	19.624.186	5738,7	26272,9	1.000.000
Jawa Barat	2016	19.739.575	5470,9	30360,2	1.312.355
Jawa Barat	2017	20.636.957	5142,9	38390,6	1.420.624
Jawa Barat	2018	20.848.173	5573,5	42278,2	1.544.360
Jawa Barat	2019	21.948.486	5881	49284,2	1.668.372
Jawa Barat	2020	22.068.407	4793,7	51400,5	1.810.350
Jawa Tengah	2005	15.558.350	23,9	986,4	390.000
Jawa Tengah	2006	15.747.596	380,1	275,8	450.000
Jawa Tengah	2007	11.244.988	100,7	276,5	500.000
Jawa Tengah	2008	15.784.843	135,6	1336,3	547.000
Jawa Tengah	2009	15.618.439	83,1	2642,6	575.000
Jawa Tengah	2010	15.882.741	59,1	795,4	660.000
Jawa Tengah	2011	16.029.286	175	2737,8	675.000
Jawa Tengah	2012	16.323.402	241,5	14393,2	765.000
Jawa Tengah	2013	16.234.274	464,3	12593,6	830.000
Jawa Tengah	2014	16.650.829	463,4	13601,6	910.000
Jawa Tengah	2015	16.878.584	850,4	15410,7	910.000
Jawa Tengah	2016	16.836.595	1030,8	24070,4	1.265.000
Jawa Tengah	2017	17.315.123	2372,5	19866	1.367.000
Jawa Tengah	2018	17.354.343	2372,7	27474,9	1.486.065
Jawa Tengah	2019	17.623.207	2723,2	18654,7	1.605.396
Jawa Tengah	2020	17.760.959	1363,6	30606,1	1.742.015

DIY	2005	1.734.047	17,3	2251	400.000
DIY	2006	1.752.763	48,8	2144,9	460.000
DIY	2007	1.280.898	0,8	1801,5	500.000
DIY	2008	1.877.976	16,7	1806,4	586.000
DIY	2009	1.910.639	8,1	1825,2	700.000
DIY	2010	1.858.956	4,9	1884,9	745.694
DIY	2011	1.824.010	2,4	2313	808.000
DIY	2012	1.880.006	84,9	2805,9	892.660
DIY	2013	1.866.055	29,6	2864,6	947.114
DIY	2014	1.972.478	64,9	3568,5	988.500
DIY	2015	1.951.922	89,1	3951,6	988.500
DIY	2016	2.040.132	19,6	4522,8	1.237.700
DIY	2017	2.054.530	36,5	4817,4	1.337.645
DIY	2018	2.097.417	81,3	10949,1	1.454.154
DIY	2019	2.136.382	14,6	9667,8	1.570.923
DIY	2020	2.107.044	9,7	9485,9	1.704.608
Jawa Timur	2005	17.679.076	702,2	4056,9	340.000
Jawa Timur	2006	17.8151.42	384,3	517,4	390.000
Jawa Timur	2007	12.799.689	1689,6	1724,7	448.500
Jawa Timur	2008	18.871.819	457,1	2778,3	500.000
Jawa Timur	2009	19.214.139	422,1	4290,7	570.000
Jawa Timur	2010	19.154.824	1769,2	8084,1	630.000
Jawa Timur	2011	19.173.183	1312	9687,5	705.000
Jawa Timur	2012	19.206.794	2298,8	21520,3	745.000
Jawa Timur	2013	19.460.153	3396,3	34848,9	866.250
Jawa Timur	2014	19.595.949	1802,5	38132	1.000.000
Jawa Timur	2015	19.584.086	2593,4	35489,8	1.000.000
Jawa Timur	2016	19.381.614	1941	46331,6	1.273.490
Jawa Timur	2017	20.066.760	1566,7	45044,5	1.388.000
Jawa Timur	2018	20.322.598	1333,4	33333,1	1.508.894
Jawa Timur	2019	20.709.093	866,3	45452,7	1.630.059
Jawa Timur	2020	21.140.589	1575,5	55660,6	1.768.777
Banten	2005	3.286.227	668,2	3833,2	585.000
Banten	2006	3.248.414	511,9	3815,2	661.613
Banten	2007	2.542.866	708,6	1068,7	746.500
Banten	2008	3.660.628	477,7	1989,1	837.000
Banten	2009	3.748.802	1412	4381,7	917.500
Banten	2010	4.198.900	1544,2	5852,5	955.300
Banten	2011	4.498.629	2171,7	4298,6	705.000
Banten	2012	4.763.137	2716,3	5117,5	745.000
Banten	2013	4.824.430	3720,2	4008,7	866.250

Banten	2014	4.896.043	2034,6	8081,3	1.325.000
Banten	2015	5.016.792	2542	10709,9	1.600.000
Banten	2016	5.161.386	2912,1	12426,3	1.784.000
Banten	2017	5.291.850	3047,5	15141,9	1.931.180
Banten	2018	5.473.929	2827,3	18637,6	2.099.385
Banten	2019	5.619.535	1868,2	20708,4	2.267.990
Banten	2020	5.586.895	2143,6	31145,7	2.460.996

